Cita Ekonomika
Jurnal Ilmu Ekonomi

Cita Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 19 (1) 2025 | 24-31
https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v19i1.16187

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon

The Effect of Fiscal Decentralization on Ambon City's Economic Growth

Jani[1*], Arsyad Matdoan[2], Rukmuin Wilda Payapo[3], Fredy Hendry Louhenpessy[4]

[12,3,4]Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kota Ambon, Maluku, Indonesia
[*)]*E-mail korespondensi: janieffendy77@gmail.com*

Diterima: 18 November 2024 | Direvisi: 26 Desember 2024 | Disetujui: 26 Mei 2025 | Publikasi online: 30 Mei 2025

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of fiscal decentralization on economic growth in Ambon City. Ambon City has implemented fiscal decentralization, but its economic development is still lagging behind other regions in Indonesia. Qualitative and quantitative analysis was used, with the results showing an average increase in the level of fiscal decentralization of 14% over 10 years (2014-2023) which had a significant effect on Regional Original Income (PAD) and government financial performance. Meanwhile, Ambon City's economic growth as measured by Real GRDP experienced an average increase of 4.57% in the same period. The effect of fiscal decentralization on economic growth reached 94.2%, showing a strong and positive relationship. Therefore, the Ambon City government needs to intensify existing sources of income, or extensify existing sources by utilizing the economic potential in Ambon City so that PAD continues to increase without burdening the community's economy and implement decentralization policies. maximal fiscal capacity, so that economic growth in Ambon City can increase from year to year.

Kata kunci: *Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Original Income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Kota Ambon telah menerapkan desentralisasi fiskal, namun perkembangan ekonominya masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan, dengan hasil menunjukkan peningkatan rata-rata tingkat desentralisasi fiskal sebesar 14% selama 10 tahun (2014-2023) yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon yang diukur melalui PDRB Riil mengalami kenaikan rata-rata 4,57% dalam periode yang sama. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 94,2%, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Ambon perlu melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada, atau melakukan ekstensifikasi dari sumber-sumber yang ada dengan memanfaatkan potensi ekonomi di Kota Ambon sehingga PAD itu terus mengalami peningkatan tentunya tanpa membebani ekonomi masyarakat dan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Kata kunci: *Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah*

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under Department of Economic Development, FEB Pattimura University. P-ISSN: 1978-3612, E-ISSN: 2775-3328

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian atau seluruh kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organ yang lebih rendah. Desentralisasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Dengan demikian desentralisasi maka daerah diberikan kewenangan atau otoritas guna menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan juga pertanggungjawaban (Adissya Mega Christia dkk, 2019). Pemerintah daerah diharapkan bersikap untuk transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam sistem pengelolaan keuangan yang merupakan sumber utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Rahmanurrasjid, Amin 2008). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan undang – undang ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan memperkuat implementasi desentralisasi fiskal serta otonomi daerah di Indonesia.

Program desentralisasi fiskal Indonesia bertujuan untuk melakukan transisi pemerintahan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Menurut Bangun (2009), desentralisasi merupakan alat atau instrumen yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaankeuangan dan anggaran pembangunan di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam model pertumbuhan ekonomi membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi negara faktor diantaranya dipengaruhi oleh akumulasi modal dalam investasi, bertambahnya jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi. Menurut Mankiw, Romer, dan Weil (1992) menunjukkan bahwa model solow mengadopsi fungsi produksi Cobb- Douglass yang menjelaskan efek residual yang berkontribusi pada produktifivitas tenaga kerja dan modal.

Kota Ambon, salah satu wilayah Bagian Timur Indonesia merupakan Ibukota Provinsi Maluku, juga telah mengimplementasikan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Namun, perkembangan ekonomi di Kota Ambon masih relative tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesai Bagian Timur. Fakta menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Kota Ambon belum dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.

Desentralisasi fiskal, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), bertujuan untuk mencapai program prioritas pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia (DJPb) termasuk juga Kota Ambon. UU HKPD berfokus pada empat pilar utama, termasuk peningkatan kualitas belanja daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan otonomi daerah, yang terkait erat dengan desentralisasi fiskal, bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD terkait dengan desentralisasi fiskal juga berupaya mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal serta memperkuat sistem perpajakan daerah, yang pada akhirnya mendukung pemerataan kesejahteraan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Banyak penelitian desentralisasi fiskal masih terfokus pada level nasional atau provinsi. Penelitian ini menjadi baru karena fokusnya pada tingkat kota/kabupaten, khususnya Kota Ambon. Dalam hal kebaruan focus penelitian pada dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan seperti Kota Ambon yang belum banyak dikahi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi desentralisasi fiskal, yang tercermin dalam komponen – komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran bagi pemerintah daerah Kota Ambon terkait desentralisasi fiskal yang dilakukan selama ini. Menunjukan bagaimana desentralisasi fiskal bisa menjadi intrumen untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama di daerah kepulauan dan tertinggal. Sehingga bisa mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Data APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Ambon untuk periode 2014-2023, yang diperoleh melalui akses internet dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) Kota Ambon untuk periode 2014-2023, diperoleh melalui akses internet yang bersumber dari situs web BPS Kota Ambon https://ambon.bps.go.id, serta situs resmi pemerintahan Kota Ambon lainnya. Penelitian ini mencakup periode 10 tahun, yaitu dari 2014 hingga 2023. Dengan menggunakan data sekunder dari sumber-sumber resmi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang akurat dan relevan terkait dengan kondisi dan perkembangan di Kota Ambon.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara rinci mengenai variabel-variabel yang diteliti. Di sisi lain, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis kuantitatif dilakukan melalui perhitungan matematis dan penggunaan rumus regresi berikut:

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Rumus untuk menghitung DDF adalah sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} x\ 100\%$$

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan cara menghitung dan menganalisis hubungan antara variabel independen (derajat desentralisasi fiskal) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Melalui analisis regresi linear sederhana, penulis dapat menentukan seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah pada besarnya laju pertumbuhan ekonomi pada kota Ambon. Yang dimaksud adalah pertumbuhan PDRB kota Ambon atas dasar harga konstan untuk periode pada tahun 2012-20122 (dalam satuan persen). Kemudian dilambangkan dengan PE atau (Y). Dengan rumus Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

$$PE = \frac{PDB_t\ x\ PDB_{t-1}}{PDB_t} x\ 100\%$$

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear sederrhana. Menurut Sugiyono (2013), uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabe dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Dependen)
X : Desentralisasi Fiskal (Variabel Independen)
e : Error term
a : Konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilihat dari Prob Jarque Berra yang jika > dari 0,05 maka dinyatakan uji pada data terjadi normalitas. Tetapi jika nilai dari Prob. Jarque Berra < dari 0,05 maka uji pada data tidak terdapat normalitas.

Gambar 1. Uji Normalitas

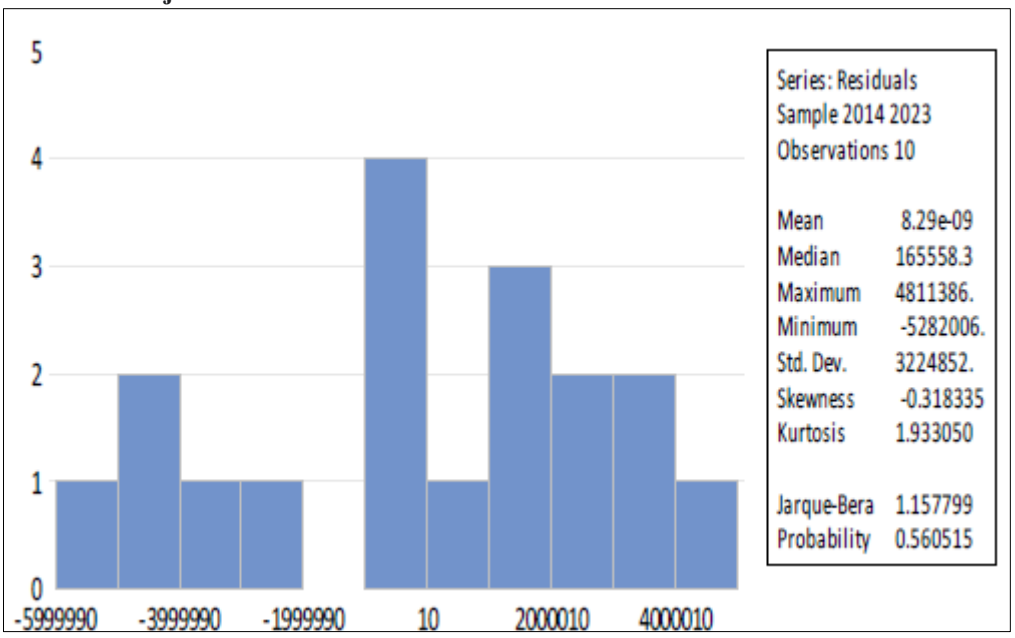

Sumber: Data Diolah, 2024

Dilihat dari gambar 1 nilai Prob. Jarque-Berra sebesar 0.560515 Berarti nilai Prob. Jarque-Berra lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan pada penelitian ini terdapat normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dinilai dari masing-masing variabel bebas jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% maka penelitian bebas dari heteroskedasititas.

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan-Godfrey Test	Value	Probability	P-Value
F-statistic	0.776261	Prob. F(3,14)	0.5265
Obs*R-squared	2.567129	Prob. Chi-Square	0.4633
Scaled explained SS	0.724492	Prob. Chi-Square	0.8674

Pada tabel 1 diatas nilai Probability variabel bebas lebih besar daripada 0.05. Sehingga pada penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Apabila nilai Obs*R-squared Prob. < 5% maka penelitian terdapat autokorelasi. Apabila nilai Obs*R-squared Prob. > 5% maka penelitian bebas autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	Value	Probability	P-Value
Obs*R-squared	6.414010	Prob. Chi-Square(2)	0.0405

Pada tabel 2 diatas nilai dari Obs*R-squared Prob sebesar 0.0405 Berarti nilai Obs*Rsquared > 5% maka penelitian ini bebas masalah autokorelasi.

Hasil Estimasi Regresi

Uji T-test merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara individu dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Apabila nilai Prob. T-statistic < 5% maka dinyatakan variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 3. Estimasi Model Regresi Linear

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R-Square
C	-3550728.	28469441	-0.124721	0.4025	0.951
X	660788.4	429180.7	1.539651	0.1459	

Berdasarkan tabel 3 diketahui variabel desentralisasi fiskal memiliki Prob t-Statistic sebesar 0.1459 dengan prob t-statistik variabel desentralisasi fiscal < 0,5%. Sehingga dinyatakan variabel bebas desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon tahun 2014-2023.

Tabel 3. Menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,951. Hal ini berarti bahwa 95,1% pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh Variabel Desentralisasi Fiskal. Dengan kata lain, pengaruh variabel bebas (Desentralisasi Fiskal) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi) adalah sebesar 95,1%. Sisanya, sebesar 4,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel.

Pembahasan

Rasio Derajat desentralisasi fiscal menjadi acuan bagi pemerintah kota / kabupaten di Indonesia melalui peningkatan PAD sehingga penyelengaraan pemerintah daerah dapat tergambar dengan jelas. Hal ini dimaksudkan sebagai keseriusan daerah untuk meningkatkan PAD nya untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah di setiap Kabupaten Kota di Indonesia.

Daerah harus melakukan inovasi dari sumber-sumber pendapatan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga tercipatnya kemandirian fiscal pada tingkat kabupaten kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sumber-sumber PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan secara umum diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu, yang dapat berasal dari upah, pendapatan dari kekayaan, maupun pembayaran transfer dari pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 1993). Semakin besar nilai PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Ketika kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah semakin tinggi, hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah yang baik dan mendukung penerapan otonomi daerah.

Nilai rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kota Ambon dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,52%, Namun, jika dirata-ratakan presentase kriteria derajat desentralisasi Kota Ambon hanya mencapai presentase 11,52% yang artinya kriteria derajat desentralisasi Kota Ambon kurang. Peristiwa ini disebabkan karena masih kurangnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon sehingga menyebabkan kecilnya pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia yang belum mampu menggali dan mengelola potensi sumber PAD maupun sumber PAD yang sudah ada. Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, nilai derajat desentralisasi fiskal Kota Ambon cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia (Hasil penelitian analisis rasio derajat desentralisasi desentralisasi fiskal di kota makassar yaitu tidak kurang dari 40%). Informasi mengenai perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 4.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seringkali dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Meningkatnya kegiatan ekonomi yang meningkatkan output barang dan jasa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dicapai, pendapatan nasional riil harus dihitung dengan menggunakan harga tetap. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu perekonomian (Sukirno, 1991).

Perkembangan ekonomi merupakan aspek kunci yang mendefinisikan prospek jangka panjang suatu perekonomian daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan perekonomian di suatu daerah dalam jangka waktu panjang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah selama jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai barang dan ja sa akhir yang dihasilkan di suatu daerah, atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh gabungan seluruh sektor ekonomi. Tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran mengenai kemajuan perekonomian suatu daerah (Todaro & Smith,

2008). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon dapat dianalisis melalui data PDRB riil berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha.

Tabel 4. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Ambon Tahun 2014-2023

Tahun	PAD	Realisasi	%	DDF
2014	135,79	1.643,10	100	8,26
2015	175,62	1.787,70	100	9,82
2016	200,08	1.831,92	100	10,92
2017	325,53	2.188,06	100	14,87
2018	199,26	2.034,16	100	9,79
2019	262,26	2.331,63	100	11,24
2020	233,18	2.140,81	100	10,89
2021	271,66	2.275,10	100	11,94
2022	281,90	2.220,22	100	12,69
2023	352,76	2.387,84	100	14,77
Rata – Rata				11,52

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tabel 5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Ambon Tahun 2014-2023

Tahun	PDRB	PDRBt-1	PDRBt - PDRBt-1	%	PE
2014	7.704.150,15	7.274.166,27	429.983,88	100	0,055812
2015	8.210.004,37	7.704.150,15	505.854,22	100	0,061614
2016	8.715.003,73	8.210.004,37	504.999,36	100	0,057946
2017	9.252.475,16	8.715.003,73	537.471,43	100	0,058089
2018	9.827.384,59	9.252.475,16	574.909,43	100	0,058501
2019	10.398.471,62	9.827.384,59	571.087,03	100	0,05492
2020	10.192.380,69	10.398.471,62	-206.090,93	100	- 0,02022
2021	10.591.812	10.192.380,69	399.431,31	100	0,037711
2022	11.149.560	10.591.812,12	557.747,88	100	0,050024
2023	11.648.040	11.149.560,11	498.479,89	100	0,042795
Rata – Rata					0,045719

Sumber : BPS Kota Ambon

Berdasarkan tabel 5 data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil Kota Ambon dari tahun 2014 hingga 2023, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon mengalami fluktuasi yang tidak optimal. Rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 4,57% per tahun. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,58%, kemudian meningkat menjadi 6,16% di tahun 2015, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 (5,79%), 2017 (6,16%), dan 2018 (5,85%), tren positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 5,49%. Penurunan yang lebih drastis terjadi di tahun 2020 menjadi -2,02%. Namun, tahun selanjutnya mengalami peningkatan 3,77% di Tahun 2021, 5% di Tahun 2022 dan menurun di Tahun 2023 menjadi 4,27%. Dapat diketahui bahwa perekonomian Kota Ambon mengalami fluktuasi yang tidak stabil, dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif rendah.

Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kewenangan dan sumber pendanaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur alokasi dana sesuai potensi dan kebutuhan lokal, mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi

layanan publik dan mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Meskipun demikian, keberhasilan inisiaif ini juga tergantung pada kesiapan kemampuan dan tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Penerapan Desentralisasi Fiskal di Kota Ambon memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

KESIMPULAN

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kota Ambon mengalami peningkatan sebesar 11,52% selama kurun waktu sepuluh tahun antara tahun 2014 hingga tahun 2023. Variasi nilai desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya berkontribusi terhadap kemajuan kinerja keuangan pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada periode yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,63% yang ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto Riil (PDRB) atas dasar harga konstan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Ambon telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang cukup kuat dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon sebesar 96,3%. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun faktor -faktor lain menyumbang 3,7% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, namun desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, Salman. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi 3*(1).

Al-Aksari, Sirajudin. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 6*(1)

Asmuruf, F.M., Rumate, A.V., & Kawung M.V.G. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15*(05).

Badrudin, Rudi. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Bangun, Andarias. (2009). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang). *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.*

Chasanah, Shania Nur., Panjawa, Jihad Lukis. (2020). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan daerah Kota Magelang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 5*(2).

Christia, Adissya Mega., & Ispriyarso Budi. (2019). Desentralisasi Fiskal dan otonomi Daerah Indonesia. *Law Reform 15*(1).

Creswell, J.W, (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed). Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Elsye, Rosmery. (2013). *Desentralisasi Fiskal*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang. http://eprints.ipdn.ac.id

Halim Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta

Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendika. Surabaya.

Hasibuan, Reni Ria Armayani., Kartika, Anggi., Suwito, Firdha Aigha., & Agustin Lismaini. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 4*(3).

Ibnu Syahmi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Tingkat Nasional*. CV Rajawali. Jakarta.

Nuraini, Ida. (17 Mei 2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama. https://semnas.unikama.ac.id/feb/

Oki, Kamilaus Konstanse., Nalle, Frederic W., Meomanu, Pricilia A.V. (2020). Analisi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan 5*(2). http://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JEP/article/view/584/328

Rahmanurrasjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. *Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro*.

Santosa, Purbayu Budi., Rahayu Retno Puji. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) 2*(1).

Todaro., Michael P. & Smith., Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9. Erlangga. Jakarta.

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Anonim,

Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Desentralisasi.